

MANAJEMEN LOGISTIK TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR OLEH BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NABIRE PROVINSI PAPUA TENGAH

Beatriks Prasetyo Mote
NPP. 30.1454

Asdaf Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua
Program Studi Manajemen Keamanan Dan Keselamatan Publik
Email: samuelbeatriks12345@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr, Dedy Suhendi, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Background: Logistics is the most important element in every humanitarian assistance effort, especially flood emergency response in Nabire Regency. This disaster logistics assistance is very necessary for disaster victims, so it must be on time, target, location, quantity, quality and also in accordance with the needs of flood disaster victims during emergency response. **Objectives:** The purpose of this research is to find out how the logistics management of flood disaster emergency response in Nabire Regency will be carried out by BPBD and also to analyze whether the humanitarian assistance is appropriate, fast, precise and procedural and can be accounted for. **Method:** This research uses descriptive qualitative methods using Logistics Management Theory according to H.Subagya (1994). The data obtained is through interviews and observations which are then analyzed using a deductive mindset. Interviews were conducted with BPBD employees and personnel. The data obtained is then presented, analyzed, reduced and then drawn conclusions. **Results:** This emergency response humanitarian logistics activity can run well and in accordance with the duties and functions of other things can also be seen from the establishment of coordination between actors such as the Nabire Regency Government itself, the Regional Disaster Management Agency, the Social Service, Basarnas, TNI / POLRI, SATPOL, Bulog, and communities. Coordination that goes well so that, in its implementation, it also goes well and also the people in Nabire Regency have a high social spirit. **Conclusion:** The research concluded that the logistics management of flood disaster emergency response in Nabire Regency, Central Papua Province, is running quite well and its implementation is also based on the main tasks and functions and existing regulations.

Keywords: Logistics Management, Emergency Response, Flood Disaster

ABSTRAK

Latar Belakang: Logistik adalah unsur yang paling penting dalam setiap upaya bantuan kemanusiaan terutama tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire. Bantuan logistik bencana ini sangat diperlukan bagi korban bencana, maka harus tepat waktu, sasaran, lokasi, jumlah, kualitas dan juga sesuai dengan kebutuhan korban bencana banjir pada saat tanggap darurat. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui bagaimana manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire yang akan dilakukan oleh BPBD dan juga menganalisa apakah bantuan kemanusiaan tersebut sudah sesuai, cepat, tepat dan prosedural serta dapat dipertanggungjawabkan. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan Teori Manajemen Logistik menurut H.Subagya (1994). Data yang diperoleh adalah melalui wawancara dan observasi dimana selanjutnya dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Wawancara yang dilakukan dengan pegawai maupun personil BPBD. Data yang diperoleh kemudian disajikan, dianalisis, direduksi kemudian ditarik kesimpulan. **Hasil:** Kegiatan logistik kemanusiaan tanggap darurat ini dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan tupoksi hal lain juga dapat dilihat dari terjalannya koordinasi antar aktor seperti Pemerintah Kabupaten Nabire sendiri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Basarnas, TNI/POLRI, SATPOL, Bulog, maupun komunitas-komunitas. Koordinasi yang berjalan dengan baik sehingga, dalam pelaksanaannya juga berjalan dengan baik serta juga masyarakat di Kabupaten Nabire mempunyai jiwa sosial yang tinggi. **Kesimpulan:** Penelitian mendapatkan kesimpulan yaitu manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah berjalan dengan cukup baik dan pelaksanaannya juga berdasarkan tupoksi serta aturan yang ada.

Kata Kunci: Manajemen Logistik, Tanggap Darurat, Bencana Banjir

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia atau yang biasanya disebut juga Nusantara mempunyai banyak keanekaragaman. Keadaan ini didukung oleh letak geografis Indonesia pada 6⁰ Lintang Utara -11⁰ Lintang Selatan dan 95⁰ Bujur Timur -141⁰ Bujur Timur. Indonesia berada di garis khatulistiwa dan wilayah Indonesia mempunyai deretan gunung berapi yang terbentuk melengkung mulai dari utara Pulau Sumatera – Pulau Jawa – Pulau Nusa Tenggara hingga sampai di Pulau Sulawesi Utara Indonesia serta dapat disebut dengan cincin api pasifik (*Pacific Ring of Fire*).

Faktor-faktor tersebut membuat Indonesia rentan terhadap bencana. Bencana yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh pengaruh kondisi tata letak geografis sehingga, setiap tahunnya Indonesia terjadi bencana, selain faktor tersebut terdapat juga pengaruh dari kondisi penduduk atau biasanya disebut demografi. Demografi yang ada di Indonesia cukup besar dan kurang merata hal tersebut menambah risiko bencana. Dari sekian banyak bencana yang terjadi di Indonesia, bencana banjir adalah bencana langganan dan sangat mendominasi dibandingkan dengan bencana lainnya. Bencana banjir merupakan bencana alam yang terjadi di suatu wilayah yang tergenang oleh air dengan jumlah yang sangat besar. Bencana ini menjadi salah satu masalah yang sangat serius dan menjadi suatu perhatian serta membutuhkan penanganan khusus baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat.

Kejadian bencana banjir yang terjadi hampir di seluruh kawasan Indonesia salah satunya terjadi di Kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah yaitu Kabupaten Nabire. Kabupaten Nabire terletak di seputaran leher burung Cendrawasih, dan dekat dengan kawasan Teluk Cendrawasih Provinsi Papua, serta berdekatan dengan Samudra Pasifik, letak kawasan Kabupaten Nabire berada diantara tiga lempengan bumi sehingga mengakibatkan rawan bencana.

Apabila terjadi bencana banjir yang menjadi langganan di Kabupaten Nabire maka, dibutuhkannya penanggulangan bencana terutama pada saat tanggap darurat bencana banjir. Unsur penting dalam penanggulangan bencana yang dibutuhkan yaitu logistik kemanusiaan.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Pengelolaan bantuan logistik pada tahap tanggap darurat bencana (*emergency*) sangat penting, namun manajemen logistik di Kabupaten Nabire kurang sehingga mengakibatkan terhambat bantuan kemanusiaan. Pada tahap ini kurangnya koordinasi antar sesama sehingga tidak ada persiapan kesiapsiagaan sehingga bencana banjir menjadi ancaman yang serius. Keadaan ini sangat membutuhkan bantuan pasokan seperti

sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan lainnya. Namun yang menjadi permasalahannya adalah jarak tempuh dari kota menuju daerah bencana cukup jauh, dan membutuhkan beberapa jam untuk naik kendaraan menuju lokasi bencana tersebut serta terdapat juga beberapa masyarakat yang tidak ingin mengungsi sehingga membentuk satgas dan harus berpatroli terutama dalam mendistribusikan logistik ke daerah bencana. Hal semakin kompleks ketika akses jalan rusak dan banyak yang tidak bisa dilewati dengan kendaraan sehingga harus diangkut dengan kendaraan lain, dengan adanya beberapa hambatan tersebut membuat pendistribusian logistik lambat sedangkan logistik pada tahap ini sangat dibutuhkan. Pelaksanaan data logistik yang lambat dan kurang tepat sasaran mengakibatkan menghambatnya pendistribusian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka sangat dibutuhkan manajemen logistik yang baik, agar bisa berjalan sesuai dengan tahapan yang ada. Untuk mengatasi hal tersebut terdapat satu aturan yang mengatur mengenai manajemen logistik yaitu Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik Dan Peralatan Penanggulangan Bencana. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire harus berpedoman terhadap ketentuan. Peraturan ini dibuat agar pengelolaan logistik dan peralatan dapat dilaksanakan dengan cepat, akurat dan tepat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan penelitian sebelumnya dengan menggunakan topik maupun tema yang sama yaitu mengenai manajemen logistik. Sehingga dapat dijadikan pedoman dan perbandingan oleh peneliti saat ini dengan peneliti terdahulu.

Perbedaan penelitian Nasurull, Eko Teguh Paripurn, Johan Danu Prasetyo (2021) meneliti di Kendari dan berfokus pada pengelolaan bantuan logistik bencana banjir dengan studi kasus tanggap darurat bencana di Kota Kendari menggunakan pendekatan kualitatif. Pada peneliti Gerry Purwanto

(2020) meneliti di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, meneliti tentang tata Kelola bantuan logistik bagi korban banjir dengan menggunakan teori manajemen risiko bencana oleh Syarief dan Kondoatie (2006) dengan menggunakan metode kualitatif. Pada peneliti Ischa Maburris Sahilal, Sarwono Dan Imam Hanafi (2015) Peneliti meneliti tentang tata bantuan logistik bagi korban bencana alam di Kabupaten Bojonegoro metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Pada peneliti Riza Yani (2019) Skripsi penelitian ini pada titik lokasi penelitian, lokasi penelitian di Kota Padang dan berfokus dalam manajemen logistik dan peralatan oleh badan penanggulangan bencana daerah. Pada penelitian terakhir Annisa Iskaputri, Amran Raaza, Muh. Alwy Arifin meneliti tentang manajemen logistik badan penanggulangan bencana daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Peneliti melakukan penelitian yang berbeda yakni meneliti ini di BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yang akan fokus pada topik mengenai manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir. Metode yang digunakan yakni metode kualitatif deskriptif, sedangkan teori peneliti menggunakan teori manajemen logistik menurut H.Subagya (1994) tentang 7 fungsi manajemen logistik, berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan mengenai manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire.

1.5 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu untuk mengetahui manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam memaksimalkan manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire, dan juga untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire dalam mengatasi faktor penghambat manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir.

II. METODE

Peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan metode penelitian yang lebih memperlihatkan obyek alami, penelitian kualitatif ini lebih menitikberatkan pada makna. Menurut pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:3) memaparkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang digunakan untuk menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tulisan dari orang maupun sumber serta pengamatan terhadap beberapa tujuan yang hendak diteliti.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan 11 orang informan serta personil lain yang terdapat di BPBD Kabupaten Nabire yang beradadi tempat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyaluran logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire sudah di jalankan sesuai dengan tupoksi yang ada serta berdasarkan peraturan yang ada. BPBD Kabupaten Nabire mempunyai bidang yang mengatur logistik tanggap darurat agar semua berjalan dengan efektif dan efisien. Manajemen logistik tanggap darurat di Kabupaten Nabire selalu berjalan sesuai dengan aturan dan mekanismenya, sehingga pada saat melakukan pelaporan pertanggung jawabannya sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Berikut ini terdapat pernyataan dari Bapak Stevanus Tebai, A.Md yang mempunyai jabatan sebagai Kepala Bidang Logistik dan Kedaruratan sebagai berikut :

Pihak BPBD pasti akan memberikan bantuan logistik bagi korban bencana, namun sebelumnya, pihak BPBD akan melakukan investigasi lokasi bencana, lalu membuat laporan setelah itu menyalurkan logistik.

Kualitas aksi manajemen logistik sudah baik dan sesuai dengan aturan dan tupoksinya. Mengenai tindakan tanggap bencana sudah baik, walaupun terdapat beberapa hambatan seperti anggaran yang kurang memadai maka pihak BPBD akan mencari jalan keluar seperti membuat proposal bantuan dana bagi korban bencana ke Pemerintah Daerah untuk mendapatkan Dana Hibah setelah itu akan melanjutkan manajemen logistik tanggap darurat bencana, selain faktor penghambat tersebut adapun faktor penghambat lainnya yaitu peralatan yang sudah rusak dan tidak lengkap

seperti BPBD mempunyai water boot tetapi tidak mempunyai mesin dan mobil pemadam kebakaran yang sudah rusak serta tidak mempunyai alat pelindung diri. Hal tersebut menghambat jalannya manajemen logistik, namun BPBD dapat mengatasi semuanya sehingga sampai saat ini manajemen logistik dapat berjalan dengan baik. Adanya permasalahan tersebut peneliti akan menjelaskan mengenai manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, dengan menggunakan teori fungsi manajemen logistik menurut Subagya (1994).

3.1 Fungsi Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan

Strategi fungsi perencanaan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nabire dilakukan dengan cara melihat dari jumlah KK (Kartu Keluarga) yang ada di wilayah terkena bencana, sehingga hal ini dapat memudahkan petugas untuk dapat melakukan pendataan maupun mobilisasi bantuan yang dapat membantu masyarakat. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustinus Sanggenafa, SE yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Nabire :

Fungsi perencanaan ini dilakukan sudah berjalan namun terkendala di pembiayaan, BPBD sendiri mengusulkan dana onfoll tetapi tidak direpson, sehingga tidak dapat diupayakan. Tetapi pada tahun 2023 kami akan mengusahakan, saat triwulan akan mengajukan perencanaan dana onfoll untuk tanggap darurat.

Fungsi Perencanaan dan Penentuan Kebutuhan yang dilakukan melalui rencana pembelian, dikarenakan bantuan kemanusiaan tanggap darurat harus di belanjakan dan didistribusikan kepada korban bencana saat itu juga serta pembelian ini dinilai lebih efisien, dan juga Instansi tersebut tidak pernah menyimpan logistik ditakutkan akan kadaluwarsa sehingga tidak membuang-buang biaya.

3.2 Fungsi Penganggaran

Anggaran yang didapatkan oleh BPBD Kabupaten Nabire selama ini berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan Daerah) Kabupaten Nabire, anggaran yang didapatkan selama ini berjalan dengan baik dan disalurkan melalui pos tanggap darurat. BPBD mendapatkan anggaran yang cukup banyak namun anggaran tersebut juga di gunakan untuk kebutuhan lainnya seperti pemeliharaan peralatan, sehingga dana untuk logistik kurang.

Pelaksanaan dilapangan mengenai anggaran logistik tanggap darurat bencana dilakukan melalui berbagai tahap, berikut dibawah ini pernyataan dari Bapak Imanuel Monei, S.Pd selaku Kepala BPBD Kabupaten Nabire :

Anggaran yang digunakan adalah APBD Kabupaten Nabire. Hal ini dilakukan dengan membuat surat ke Bupati lalu bisa di keluarkan dananya setelah itu dibelanjakan lalu didistribusikan ke korban bencana.

Terdapat juga wawancara dengan Bapak Agustinus Sanggenafa, SE. yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Nabire :

Dalam mengeluarkan anggaran pemerintah maunya dibuat data dulu yang terkena bencana, dokumentasi lalu dibuat proposalnya setelah itu baru dicairkan. Atau biasanya juga Bapak Bupati langsung memerintahkan ke toko lalu belanja logistik bama. Setelah itu membuat surat untuk mendapatkan Bulog;

Padahal BPBD adalah OPD yang harus tetap stay setiap waktu terutama di Kabupaten Nabire ini termasuk daerah yang rawan bencana di Papua, maka dana darurat ini harus dibahas serta dikeluarkan separuh saja setiap tahunnya.

Mengenai hal itu pihak BPBD akan menaruh di kas agar dapat digunakan disetiap waktu apabila, terjadi bencana tidak kewalahan saat dibutuhkan logistik tinggal di keluarkan. Hal tersebut di kemukakan oleh Pak Kepala pada saat rapat. Fungsi penganggaran di BPBD Kabupaten Nabire cukup baik, namun anggaran yang di keluarkan untuk logistik tanggap darurat dan peralatan selalu naik turun. Anggaran tanggap darurat ini akan cair apabila sudah ditandatangani oleh Bupati. Anggaran merupakan unsur penting oleh sebab itu harus ada terutama pada saat tanggap darurat bencana dan logistik.

3.3 Fungsi Pengadaan

Fungsi ini akan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nabire pada saat tanggap darurat bencana dikarenakan, logistik tersebut takut kadaluwarsa dan hanya membuang-buang uang saja. Pengadaan yang dilakukan yaitu berupa pembelanjaan setelah itu langsung didistribusikan ke lokasi korban bencana melalui pihak ketiga yang dipercaya. Kegiatan ini dilakukan dengan cara langsung oleh bidang darurat yang menjalankan tugasnya setelah itu akan dilakukan pelaporan ke pimpinan. Pengadaan manajemen

logistik tanggap darurat tersebut mempunyai peran penting yaitu berupa membantu menyelamatkan masyarakat, meminimalkan kerugian, menjaga ketersediaan dan kualitas bantuan, meningkatkan efisiensi distribusi bantuan, mengurangi dampak jangka Panjang. Berikut ini pernyataan dari Bapak Imanuel Monei, S.Pd yang mempunyai jabatan Kepala BPBD Kabupaten Nabire :

Pada saat pengadaan dana darurat akan selalu ada dan memang harus ada walaupun anggarannya kurang akan tetap diadakan karena ini menyangkut masalah hidup masyarakat.

Terdapat juga hasil wawancara dari Bapak Stevanus Tebai, A.Md sebagai Kepala Kedaruratan dan Logistik :

BPBD akan langsung ke pembelanjaan lalu akan didistribusikan ke korban. Bidang Darurat akan menjalankan tugas dan melaporkan ke Kepala BPBD terkait mengenai pembelanjaan logistik tanggap darurat. Pengadaan ini akan dilakukan pada saat tanggap darurat saja, karena ditakutkan barang logistik akan kadaluwarsa sehingga tidak di simpan di Gudang dan akan dibuang itu sama saja membuang-buang uang. Pada saat bencana saja lalu diadakan logistik tanggap darurat.

Selain itu terdapat juga pernyataan menurut Bapak Agustinus Sanggenafa, SE sebagai Sekretaris BPBD menyatakan

Logistik yang di distribusikan yaitu bama (bahan makanan). Bama ini seperti, beras, gula, mie, telur, the, minyak goreng, sabun cuci, sabun mandi, aqua, sarden kebutuhan yang dibagikan yaitu kebutuhan sehari hari dan kebutuhan yang di beri hanya pada saat tanggap darurat saja.

Mengenai pengadaan yang lainnya BPBD melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, pengadaan yang diberikan seperti air bersih, obat-obatan atau kesehatan dan sebagainya.

3.4 Fungsi Penyimpanan dan Penyaluran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire jarang melakukan penyimpanan dikarenakan, logistik yang dibagi berupa bama maupun sembako sehingga tidak di simpan ditakutkan akan kadaluwarsa. Untuk penyaluran yang dilakukan BPBD selalu berdasarkan data korban yang terkena bencana, penyaluran yang di buat sesuai dengan di lapangan.

Berikut ini pernyataan dari Bapak David yang menjabat sebagai Bendahara Logistik dan Peralatan :

Fungsi penyimpanan tidak digunakan, yang digunakan hanya penyaluran. Dikarenakan logistik yang dikeluarkan hanya saat tanggap darurat saja ;

Sembako atau bama tidak akan di tampung maupun di simpan digudang dikarenakan takut kadaluwarsa, kami bekerja untuk menyelamatkan bukan untuk menyakiti. Untuk beras sendiri kami akan membuat surat ke Bupati lalu akan di serahkan ke pihak bulog setelah itu beras akan dikeluarkan, setelah semua sudah di lakukan kami akan melakukan distribusi. Sebelum melakukan pendistribusian kami bagi dulu sesuai kk yang terdampak bencana.

Proses penyimpanan yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Nabire, dilakukan setelah proses penyerahan kepada pihak yang berwenang yang berada di lokasi bencana seperti Camat, Ketua RT/RW, Kepala Kampung, Ketua Adat. Proses tersebut harus dilakukan dikarenakan sebagai data untuk memepertanggungjawabkan kepada Bupati maupun pihak yang berwenang. BPBD Kabupaten Nabire menyimpan logistik di beberapa lokasi di beberapa titik seperti di tempat Ibadah, Pesantren, kantor distrik, rumah adat, balai kampung.

3.5 Fungsi Pengendalian

Fungsi dari pengendalian yaitu mengidentifikasi kebutuhan, mengatur distribusi, mengatur persediaan serta mengevaluasi keberhasilan. Pengendalian yang diterapkan oleh BPBD Kabupaten Nabire sudah sesuai dengan aturan yang ada. Semua kegiatan dibuat secara terbuka sehingga dapat di pertanggungjawabkan. Berikut pernyataan dari Bapak Imanuel Monei, S.Pd jabatan Kepala BPBD Kabupaten Nabire :

Sistem pengendalian ini dilakukan sesuai yang terjadi di lapangan dan kami BPBD melakukan kegiatan tersebut sesuai dengan aturan yang ada.

Berikut ini terdapat juga pernyataan tentang pengendalian dari Bapak Agustinus Sanggenafa, SE yang mempunyai jabatan sebagai Sekretaris BPBD Kabupaten Nabire :

Pengendalian ini diterapkan berdasarkan keadaan wilayah Kabupaten Nabire, serta tidak terlepas dari aturan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur/Peraturan Bupati/Peraturan Kepala BNPB.

Pengendalian yang baik ialah pengendalian yang dapat meminimalkan kerusakan dan kehilangan yang diakibatkan oleh bencana, serta membantu dalam memulihkan secara efektif dan cepat.

3.6 Fungsi Pemeliharaan

Fungsi ini sudah terlaksana oleh BPBD Kabupaten Nabire dan sesuai dengan aturan yang ada. Pelaksanaan yang dilakukan untuk mengamankan serta menjaga logistik dan peralatan agar berjalan dengan aman, efektif sehingga tidak terjadi kerusakan. Peralatan yang di rawat dengan baik dapat difungsikan lagi dalam jangka waktu yang cukup panjang, mengenai logistik bagi BPBD Kabupaten Nabire tidak melakukan penyimpanan sehingga fungsi pemeliharaan untuk logistik tidak dijalankan. Pemeliharaan logistik tidak dijalankan dikarenakan takut kadaluwarsa, sehingga hanya menjalankan pemeliharaan peralatan. Dibawah ini terdapat pernyataan dari Bapak David sebagai Bendahara Logistik dan Pemeliharaan:

Pemeliharaan sejauh ini selalu aman karena dijaga dan dirawat, namun dana yang didapatkan untuk pemeliharaan selalu mengalami naik turun.

Pemeliharaan yang dilakukan BPBD sudah cukup baik.

3.7 Fungsi Penghapusan

Penerapan fungsi penghapusan bagi manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire sejauh ini belum dilakukan penghapusan dalam bentuk apapun dikarenakan semua peralatan maupun perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah masih minim atau terbatas. Mengenai penghapusan logistik yang dilakukan oleh OPD tersebut dilakukan pada saat pendistribusian logistik di lokasi bencana lalu di hapuskan yang menyatakan bahwa logistik tersebut telah sampai pada korban bencana. Berikut dibawah ini terdapat juga pernyataan Bapak Imanuel Monei, S.Pd sebagai Kepala BPBD Kabupaten Nabire :

Penghapusan cukup baik, seperti mobil damkar yang rusak dan speedboot yang tidak mempunyai mesin semuanya sudah di data sehingga nanti akan dilaporkan ke pihak pusat dan daerah.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sama halnya dengan temuan penelitian sebelumnya yang membahas mengenai manajemen logistik, namun hal tersebut tidak menjadi acuan sepenuhnya bagi peneliti saat ini dalam meneliti manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya (Opsional)

Kegiatan manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire sudah berjalan cukup baik, namun terdapat juga faktor penghambatnya. Hal tersebut dapat diatasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dengan baik, faktor penghambat seperti anggaran yang kurang namun dapat diupayakan dengan cara membuat pelaporan ke Bupati. Selain anggaran yang menjadi faktor penghambat faktor penghambat lainnya yaitu peralatan yang kurang baik dan rusak. Hambatan-hambatan tersebut dapat diupayakan dengan cara melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak seperti Bulog, Basarnas, TNI/POLRI, Pemerintah maupun masyarakat.

IV. KESIMPULAN

peneliti mendapatkan kesimpulan yaitu manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah berjalan dengan cukup baik dan pelaksanaannya juga berdasarkan tupoksi serta aturan yang ada. Walaupun terdapat beberapa hambatan seperti kurangnya anggaran, peralatan maupun perlengkapan yang kurang memadai tetapi hal tersebut tidak menghalangi BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah untuk menanggulangi bencana yang terjadi terutama manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir yang terjadi selama ini. Hambatan yang dialami oleh BPBD Kabupaten Nabire dapat dilalui dengan cara melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai instansi pemerintahan, kelembagaan maupun bantuan dari masyarakat

sekitar untuk menanggulangi bencana yang terjadi terutama dalam manajemen logistik tanggap darurat.

Keterbatas Peneliti.

Peneliti melakukan penelitian dengan mempunyai keterbatasan waktu maupun biaya

Arah Masa Depan Penelitian.

Peneliti menyadari bahwa penelitian ini merupakan penelitian awal, oleh karena itu peneliti menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi yang sama berkaitan dengan manajemen logistik tanggap darurat bencana banjir di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah serta diharapkan mendapatkan hasil yang mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada kepada Pihak BPBD Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah yang sudah membantu peneliti dalam melaksanakan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Maris Rukman Gunawan, B. L. (2021). *Modul Mata Kuliah Manajemen Logistik Bencana* (cetakan pertama ed.). Fakultas Perlindungan Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Dr. I. Khambali, S. M. (2017). *Manajemen penanggulangan bencana*. (P. Christian, Ed.) Yogyakarta: Andi.

George R. Terry. (2012). *Prinsip-prinsip Manajemen* (Cet. ke-11 ed.). (J. S. D.F.M, Trans.) Jakarta: Bumi Aksara.

M.S, H. (1988). *Manajemen Logistik*. Jakarta: CV Haji Masagung.

Annisa Iskaputri, A. R. (2020, February 25). Manajemen Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Hasanuddin Journal of Public Health*, 1(1), 41-50.

Yani, R. (2019, Juli 25). *Manajemen Logistik Dan Peralatan Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang Tahun 2017-2018 Skripsi*. Retrieved From E-Skripsi Universitas Andalas: [Http://Scholar.Unand.Ac.Id/Eprint/47963](http://Scholar.Unand.Ac.Id/Eprint/47963)

Purwanto, G. (2022, Desember 2). Tata Kelola Bantuan Logistik Korban Bencana Banjir Di Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Mozaik Volume Xii Edisi 2 Desember 2020*, 72-84.

Ischa Maburris Sahilala, S. I. (n.d.). Tata Kelola Distribusi Bantuan Logistik Korban Bencana Alam (Studi Empiris pada Bencana Banjir di Kabupaten Bojonegoro). *Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 3 No. 5, 812-817.*

Nasrullah, Eko Teguh Paripurno, Johan Danu Prasetyo. (2021, February). Pengelolaan Bantuan Logistik Bencana Banjir : Studi Kasus Tanggap Darurat Bencana Banjir Dikota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, 2 No.07, 25-38.*

Dr. Zaroni, C. C. (2017, february 10). Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana (Bagian 1 dari 2 tulisan). *Supply Chain Indonesia.*

Dr. Zaroni, C. C. (2017, february 2). Manajemen Logistik Penanggulangan Bencana (Bagian 2 dari 2 tulisan). *Supply Chain Indonesia.*

Dr. Zaroni, C. C. (2018, maret 23). Bencana dan Penanggulangannya dalam Perspektif Logistik (Bagian 3 dari 3 tulisan). *Supply Chain Indonesia.*

RPJMD Kabupaten Nabire Tahun 2021-2026

Distrik Nabire Dalam Angka Tahun 2022

Kabupaten Nabire Dalam Angka Tahun 2023

Badan Pusat Statistik Kabupaten Nabire 2020-2022

